

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Bagir Manan, 2004, *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta, FH UII
- Daan Suganda, 1992, *Sistem Pemerintahan Republik Indonesia, Pemerintahan di Daerah*, Bandung, Sinar Baru.
- Djuanda, 2004, *Hukum Pemerintahan Daerah : Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*, Alumni B, Bandung.
- Hidayat, 1979, *Pengembangan Sektor Informal dalam Pembangunan Nasional : Masalah dan Prospek*, LP3ES
- Ibnu Syamsi, 1983, *Pokok-pokok Organisasi Manajemen*, Bina Aksara, Jakarta.
- Josef Riwo Kaho, 2001, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraanya)* Jakarta, Raja Grafindo
- Kansil. CST. 1982. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Koesnadi Hardjosoemantri. 1999. *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Konsorsium Monitoring dan Pemberdayaan Institusi Publik (KOMPIP) Solo & The Ford Foundation, 2004, *"Kajian Implikasi Otonomi Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Marjinal di Kota Surakarta"*, Surakarta.
- Kuntana Magnar, 1984, *Pokok-pokok Pemerintahan Daerah Otonom dan Wilayah Administratif*, Bandung, Armico.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UMY.
- Mulya Lubis, T. 1987. *Hak Asasi Manusia dan Pembangunan*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta
- Rianto Nugroho D, 2000, *Otonomi Daerah (Desentralisasi Tanpa Revolusi)*, Jakarta, Elekmedia Komputindo Kelompok Gramedia.

Soetjipto Wirosarjono, 1976, *Masalah Tenaga Kerja Disektor Informal*, dalam *Prisma*, Nomor 5 September

Saukani, Afan Gaffar, Ryaas Rasyid, 2002, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Sudjaipul Rahman, 2004, *Pembangunan dan Otonomi Daerah, Realisasi Program Gotong Royong*, Pancar Suwuh, Jakarta

The Liang Gie, t.t . *Pertumbuhan Daerah Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta

Todung Mulya Lubis. 1987. *Hak Asasi Manusia dan Pembangunan*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta.

Tresna Sastrawijaya, A. 1991. *Pencemaran Lingkungan*, Rineka Cipta, Jakarta.

Tresna Wijaya. 1991. *Pencemaran Lingkungan*, Rineka Cipta, Jakarta.

Surat Kabar/Internet

Samhadi, Sri Hartati. 2006. <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0604/15/Fokus/2585095.htm>. Akses 23/02/2010, jam 14:22:34 WIB.

[http://www.huma.or.id/document1/02_info_hukum/Proses Penyusunan Peraturan Daerah dalam Teori dan Praktek, 20Sept 2004pdf](http://www.huma.or.id/document1/02_info_hukum/Proses_Penyusunan_Peraturan_Daerah_dalam_Teori_dan_Praktek_20Sept_2004pdf).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Tahun 1945 Hasil Amandemen dan proses Amandemen

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.

- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No.26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima**
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pedagang Kaki Lima**
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pedagang Kaki Lima**
- Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2004 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima yang Menggunakan Kendaraan Bermotor**
- Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 119 Tahun 2004 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kawasan Khusus jalan Malioboro – A. Yani**
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2005 tentang Perubahan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 119 Tahun 2004 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kawasan Khusus jalan Malioboro – A. Yani**
- Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2007 tentang Penetapan Golongan Jenis Tempat Usaha dan Jenis Pedagang Pedagang Kaki Lima di Kota**